

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Widodo (2010) , Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang, sebagai wujud pemenuhan kewajiban terhadap masyarakat Indonesia. Tentunya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya tersebut. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan segala jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Hal ini juga diungkapkan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang di dapat.

Indonesia sendiri pada saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang, salah satunya adalah perkembangan infrastruktur. Kota Malang Jawa Timur adalah salah satu kota yang sedang mengalami pembangunan mulai banyak investor yang memulai bisnis di

Kabupaten Malang ini. Pemerintah juga melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang ada untuk menunjang perkembangan yang terjadi. Dikarenakan hal tersebut jumlah transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan meningkat dengan pesat.

Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak melihat ini sebagai potensi yang besar dalam pemasukan pajak untuk menambah APBN. Pada saat melakukan jual beli tanah dan bangunan, baik pembeli maupun penjual akan dikenakan pajak. Penjual akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas uang pembayaran harga objek yang sudah diterima, sedangkan pembeli akan dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenakan bukan hanya saat jual beli tanah, tapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (tukar menukar, hibah, waris, pemasukan tanah kedalam perseroan, dan lain-lain).

Dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan yang menjadi subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu pembeli. Ketika kewajiban pajak nya sudah dipenuhi maka wajib pajak akan menerima bukti pembayaran dalam hal ini Surat Setoran Pajak (SSP), surat ini sangat penting karena menjadi salah satu syarat berkas yang harus ada ketika wajib pajak ingin mengganti kepemilikan dalam Sertifikat Tanah, namun SSP yang dilampirkan adalah SSP yang sudah divalidasi oleh kantor pelayanan pajak setempat, namun SSP yang diserahkan ke kantor pajak tidak langsung divalidasi begitu saja, kantor pajak akan melakukan penelitian guna

membuktikan data dan berkas-berkas yang di lampirkan oleh wajib pajak sudah benar dan valid. Dalam prosesnya pun jarang di temukan banyak kendala seperti data yang tidak sesuai, berkas yang kurang, bahkan harga yang di cantumkan tidak sesuai dengan nilai perolehan yang sebenarnya.

Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25, Kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari UU Nomor 7 tahun 1991, UU Nomor 10 tahun 1994, UU Nomor 17 tahun 2000 serta yang menjadi landasan hukum sampai saat ini adalah UU Nomor 36 tahun 2008.

Dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 di sebutkan tentang apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar indonesia , yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Namun setiap jenis Pajak Penghasilan akan diklasifikasikan berdasarkan subjek yang menerima penghasilan. Pembagian objek pajak ini terbagi atas pasal-pasal dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Setiap pasal membahas pada setiap subjek penerima penghasilan secara lebih terperinci salah satu objek penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara yaitu Validasi SSP.

Tanah dari segi ekonomis mempunyai nilai investasi yang sangat menguntungkan sekaligus memberikan kedudukan sosial yang lebih, baik orang atau badan yang mempunyai hak atasnya. Gejala meningkatnya investasi

tanah pada saat ini dan mendatang banyak menimbulkan pengusaha-pengusaha besar dan menengah besar sangat tertarik terjun ke usaha bisnis properti disebabkan oleh beberapa hal (Muhammad, 2011).

SSP Merupakan Surat Setoran Pajak yang di gunakan wajib pajak untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak ke kas negara melalui kantor atau media pembayaran pajak lainnya yang telah di tentukan dan di tunjuk Menteri Keuangan. Hukum yang mengatur mengenai bentuk formulir SSP dan juga penjelasannya terdapat pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 38/PJ/2009 yang sudah di ubah menjadi PER-24/PJ/2013. Peraturan tersebut mengatur segala hal mengenai SSP.

Validasi SSP diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah/bangunan yang di alihkan menggunakan formulir penelitian SSP sesuai lampiran I PER 26/PJ/2010.pada tanggal 8 Agustus 2016 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (pajak.go.id)

Bedasarka hal tersebut, penulis berusaha untuk meneliti lebih dalam lagi proses peneitian data-data yang di cantumkan dalam pengajuan hingga

pemvalidasian SSP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Oleh karena itu penulis akan membahasnya dalam pembuatan Tugas Akhir yang berjudul

“ Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Singosari”

B. Rumusan masalah

1. Apakah berkas permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan ?
2. Apakah bukti pembayaran PPh atas tanah dan bangunan sudah sesuai dengan nilai yang sebenarnya ?
3. Ketidak sesuaian apa saja yang di temukan dalam Kriteria Unjuk Kerja tentang Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui formulir persyaratan PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di KPP Pratama Singosari sudah memenuhi persyaratan.
2. Untuk mengetahui penilaian atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Singosari sudah sesuai dengan nilai yang sebenarnya.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang di lakukan untuk

mengatasi hambatan dalam proses permohonan penelitian bukti pemenuhan ke kewajiban penyetoran pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan di KPP Pratama Singosari .

D. Manfaat

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat untuk beberapa pihak sebagai berikut :

- (1). Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari
 - a. Memberikan kontribusi atau referensi sebagai ilmu pengetahuan untuk penelitian di bidang Perpajakan.
 - b. Sebagai perbaikan untuk referensi pengambilan keputusan.
- (2). Bagi penduduk sekitar.
 - a. Bagi penduduk sekitar, penelitian ini bisa digunakan sebagai bukti ilmiah untuk menilai pelaksanaan pemungutan PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari
 - b. Sebagai pembanding atau penunjang penelitian dimasa mendatang sehingga dapat membandingkan dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan.

E. Definisi Operasional

1. PPh

PPh adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.

2. BPHTB

Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mengakibatkan di perolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

3. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

4. Geo Tagging

GeoTagging adalah suatu proses yang memberikan suatu identitas metadata terhadap media video, gambar, atau foto maupun website dimana akan disisipkan suatu koordinat suatu tempat secara detail koordinat dan keterangan posisi berupa letak koordinat bujuranya.

5. Pajak Terutang

Pajak Terutang adalah pajak yang harus di bayar pada satu saat, dalam masa pajak, dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

6. SIDJP9

SIDJP9 adalah aplikasi yang di gunakan untuk membuka data-data eksternal yang telah diolah Kantor Pusat untuk di tindak lanjuti oleh seksi ekstentifikasi.

7. SIDJP

SIDJP adalah aplikas sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak yang menghubungkan seluruh aplikasi perpajakan yang ada.

8. Billing

Billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing.

9. Kontraprestasi

Kontraprestasi adalah jasa imbal balik atas terjadinya suatu tindakan tertentu, atau hal-hal yang harus di lakukan seseorang atau kelompok terhadap prestasi yang sudah di berikan oleh pihak lain sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat, Bentuknya bermacam-macam, bisa dalam bentuk uang, barang, atau jasa .

F. KRITERIA UNJUK KERJA

UNJUK KERJA

Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Untuk Mencapai Standar Kopetensi di Skema.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

PERMEN NAKER TRANS

NOMOR 347 TAHUN 2014

KODE UNIT : M.692000.020.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang di butuhkan dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak.

Tabel1.1 Kriteria Unjuk Kerja Melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pembayaran atau penyetoran pajak yang kurang di bayar atau terutang	1.1 Sejumlah uang sebesar jumlah pajak yang kurang dibayar atau terutang di ajukan kepada pihak yang memiliki otorisasi keuangan. 1.2 Uang tersedia di pastikan sesuai dengan Jumlah Pajak yang kurang dibayar atau terutang
2. Membayar atau menyetor pajak yang terutang atau kurang bayar	2.1 Pembayaran atau penyetoran dipastikan di lakukan sebelum jatuh tempo 2.2 Pembayan atau penyetoran dilakukan di tempat yang sah 2.3 Bukti validasi pembayaran atau penyetoran di terima 2.4 Bukti pembayaran atau penyetoran di arsipkan